



Pelebagaan Partai Politik: Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kabupaten Manggarai Timur

Pankrasius Suraka¹, Laurensius P. Sayrani², Ardy Yosafat Pandie³, Yaherlof Foeh⁴

Program Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: suissuraka651@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of party institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) in East Manggarai Regency during the 2024 Legislative Election. This research employs a qualitative approach with a descriptive qualitative research design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The analysis is based on the party institutionalization theory proposed by Vicky Randall and Lars Svåsand, which emphasizes four main dimensions: systemness, value infusion, decisional autonomy, and reification. The findings indicate that PDI Perjuangan in East Manggarai has achieved a relatively strong level of institutionalization. Systemness is reflected in the functioning organizational structure and continuous political socialization. Value infusion is evident in the internalization of nationalist values and pro-people orientation through social programs and community engagement.

Keywords: Party Institutionalization, PDI Perjuangan, Legislative Election, Local Democracy, East Manggarai

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Manggarai Timur dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori pelembagaan partai politik Vicky Randall dan Lars Svåsand yang menekankan empat dimensi, yaitu *systemness*, *value infusion*, *decisional autonomy*, dan *reification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur telah mengalami proses pelembagaan yang relatif baik. Derajat *systemness* tercermin melalui struktur organisasi yang berjalan aktif dan sosialisasi politik yang berkelanjutan. *Value infusion* terlihat dari internalisasi nilai nasionalisme dan keberpihakan kepada *wong cilik* melalui program dan kegiatan sosial.

Kata Kunci: Pelebagaan Partai Politik, PDI Perjuangan, Pemilu Legislatif, Demokrasi Lokal, Manggarai Timur

PENDAHULUAN

Partai politik sebagai instrumen politik yang sangat strategis di dalam lanskap demokrasi patut menjadi subjek pertarungan relevansi ideologi politik yang secara makro berkontribusi terhadap arah dan tujuan kehidupan politik bangsa dan negara. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran penghubung yang strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, partai merupakan pilar penting yang harus diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam sistem politik yang demokratis (Galang Gerald, 2019, p. 137). Partai politik pada hakikatnya merupakan suprastruktur yang harus dimiliki oleh sistem pemerintahan agar dapat dikatakan demokratis, sehingga pelembagaan partai menjadi syarat penting bagi berfungsinya demokrasi secara optimal (Ridha, 2017, p. 168).

Teori institusionalisasi partai politik dikembangkan dari berbagai pemikiran ilmuwan politik. Vicky Randall dan Lars Svåsand (2002, p. 6) merumuskan konsep institusionalisasi partai sebagai pengembangan dari gagasan Samuel Huntington, Angelo Panebianco, Steven Levitsky, dan Kenneth Janda. Samuel Huntington mendefinisikan pelembagaan sebagai proses di mana organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan stabilitas melalui empat dimensi, yaitu adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Angelo Panebianco menekankan dua kriteria utama, yaitu otonomi terhadap lingkungan (*autonomy vis a vis its environment*) dan kesisteman internal (*systemness*), serta tidak menempatkan adaptabilitas sebagai syarat mutlak pelembagaan (Vicky Randall & Lars Svåsand, 2002, p. 10).

Steven Levitsky menambahkan kriteria *value infusion* yang menekankan penanaman nilai ke dalam struktur dan perilaku individu dalam partai, sedangkan Kenneth Janda menyoroti aspek eksternal melalui konsep *reification*, yaitu sejauh mana partai terinternalisasi dalam kesadaran publik (Randall & Svåsand, 2002, p. 11). Berdasarkan sintesis keempat pemikiran tersebut, Vicky Randall dan Lars Svåsand (2002, pp. 11–12) merumuskan empat dimensi utama pelembagaan partai politik, yaitu derajat kesisteman (*systemness*), identitas nilai (*value infusion*), derajat otonomi (*decisional autonomy*), dan pengetahuan publik (*reification*). Pelembagaan partai dipahami sebagai proses pematapan struktural dan kultural yang membentuk pola perilaku, sikap, dan budaya partai (Winarti & Nazaki, 2019, p. 115).

Pelembagaan partai dalam pengelolaan organisasi internal merupakan faktor penting dalam keberhasilan partai meraih suara dalam pemilu. Peran institusional partai sebagai pusat pengendali kemenangan pemilu menunjukkan bahwa keberhasilan partai sangat ditentukan oleh mekanisme internal organisasi (Usmana, 2020, p. 6). Kemampuan partai mencapai tujuan politiknya merupakan integrasi antara struktur organisasi, perilaku aktor, serta proses internal partai. Apabila internal partai bermasalah, maka kecil kemungkinan partai mampu bertahan dan menjalankan fungsi politiknya secara optimal, sehingga pelembagaan menjadi syarat penting bagi keberlangsungan partai dalam sistem demokrasi (Usmana, 2020).

Hasil pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Manggarai Timur menempatkan PDI-P keluar sebagai pemenang dengan perolehan 21.567 suara dan meraih 5 Kursi

(KPU Kabupaten Manggarai Timur, 2024). Sama seperti PDI-P, Demokrat juga meloloskan lima wakilnya ke DPRD Manggarai Timur. Jumlah kursinya bertambah banyak dari periode sebelumnya yang hanya dua kursi. Demokrat gagal merebut kursi Ketua DPRD Manggarai Timur karena kalah jumlah suara dari PDI-P. Demokrat hanya memperoleh suara sebanyak 17.916 suara, diikuti oleh Partai Hanura dan PAN dengan 4 Kursi, PKB dan Nasdem dengan 3 Kursi serta Gerindra, Golkar dan Perindro dengan 2 kursi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membentuk struktur organisasi di Kabupaten Manggarai Timur sejak tahun 2008 dan secara konsisten mengikuti kontestasi politik lokal. Dalam Pilkada Kabupaten Manggarai Timur tahun 2008, 2013, 2018, dan 2024, PDI-P belum berhasil memenangkan kontestasi eksekutif, namun menunjukkan perkembangan signifikan dalam pemilu legislatif. Perolehan kursi PDI-P bersifat fluktuatif sejak pemilu 2009 hingga 2019, sebelum mengalami peningkatan tajam dengan meraih lima kursi pada pemilu 2024. Dengan melihat latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelembagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur)".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dipilih untuk memahami secara mendalam proses pelembagaan partai politik sebagaimana dialami dan dijalankan oleh aktor-aktor partai dalam konteks sosial dan politik yang nyata. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan menginterpretasikan kondisi, situasi, serta proses sosial yang terjadi dalam organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di masyarakat (Nawawi, 1993, p. 139). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis proses pelembagaan PDI-P di Kabupaten Manggarai Timur dengan menggunakan teori pelembagaan partai politik Vicky Randall dan Lars Svåsand, yang menekankan empat dimensi utama, yaitu derajat kesisteman (*systemness*), identitas nilai (*value infusion*), derajat otonomi (*decisional autonomy*), dan pengetahuan publik atau reifikasi (*reification*) (Randall & Svåsand, 2002). Melalui pendekatan ini, penelitian menggambarkan bagaimana keempat dimensi tersebut diwujudkan dalam praktik organisasi, pola rekrutmen kader, pengambilan keputusan, relasi partai dengan masyarakat, serta persepsi publik terhadap PDI-P di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan pemahaman pelembagaan partai tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai proses sosial dan politik yang dinamis dan kontekstual. Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Manggarai Timur di Borong (Sugiyono, 2011, p. 207).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan indikator penting dari pelembagaan partai menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), khususnya dalam aspek derajat kesisteman, yang diwujudkan melalui kegiatan tatap muka, pertemuan struktur DPC, PAC, dan Anak Ranting, kampanye dialogis, kunjungan ke desa, serta

pendekatan tokoh adat dan organisasi masyarakat yang menunjukkan kemampuan adaptasi partai terhadap konteks lokal. Di internal, sosialisasi mencakup pendidikan politik mengenai AD/ART partai untuk membentuk pemahaman ideologis dan kedisiplinan kader, sementara di eksternal diwujudkan melalui kinerja legislator dan keterlibatan kader di masyarakat, menunjukkan orientasi perjuangan yang konkret.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Gorgonius Drepla Bajang selaku sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Manggarai timur:

Sosialisasi politik yang dijalankan oleh PDI-P kabupaten Manggarai Timur selain melalui pendidikan dan seminar politik mengenai AD / ART yang dilakukan oleh internal partai, juga dilakukan dengan cara tatap muka door to door dari rumah ke rumah serta pemanfaatan media sosial partai Hal ini sebagai bentuk sosialisasi mengenai arah dan perjuangan partai. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengerti dan memahami ideologi partai”.

Jika dikaitkan dengan teori pelebagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), pelaksanaan sosialisasi politik oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan derajat kesisteman (*systemness*) yang baik, terlihat dari penggunaan AD/ART sebagai rujukan utama dalam pendidikan politik kader yang dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang, dan terkoordinasi. Keterlibatan kader dan legislator dalam sosialisasi politik, baik secara langsung maupun melalui media sosial, memperkuat fungsi struktur organisasi sekaligus memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap program dan identitas partai, seperti Program KTP Sakti dan keberpihakan terhadap *wong cilik*, yang mencerminkan proses *value infusion*. Praktik ini sejalan dengan temuan Haqiqi (2016), Pratama et al. (2022), dan Bendi Juantara (2015) yang menegaskan bahwa konsistensi sosialisasi politik berbasis struktur partai merupakan indikator penting pelebagaan partai yang efektif dan berkelanjutan.

Persyaratan, Prosedur Dan Mekanisme Tertentu Dalam Penyelesaian Konflik Di Dalam Tubuh Internal Partai Berdasarkan Ad/Art Partai

Penyelesaian konflik merupakan salah satu indikator penting dari pelebagaan partai menurut kerangka Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), yang menekankan struktur organisasi stabil, aturan formal yang dipatuhi, dan mekanisme penyelesaian konflik yang terlembaga. Melalui AD/ART PDI-P, terutama Pasal 40 Anggaran Dasar dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga, partai telah menetapkan prosedur formal untuk menangani perselisihan internal. Di DPC PDI-P Kabupaten Manggarai Timur, mekanisme penyelesaian konflik internal menunjukkan tingkat pelebagaan organisasi yang relatif kuat, di mana konflik dianggap wajar tetapi dikelola melalui aturan yang jelas dan diinternalisasi oleh kader, sehingga partai tidak bergantung pada figur tertentu melainkan pada sistem dan prosedur yang disepakati bersama.

Hasil wawancara dari Bapak Vinsensius Aliman selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur:

“Dalam hal mekanisme penyelesaian konflik dalam tubuh partai semuanya tertuang dalam AD / ART partai. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir perpecahan dalam tubuh

partai itu sendiri dan sama seperti partai-partai politik lainnya, dalam tubuh PDI-P juga ada mekanisme penyelesaian konflik yang tercantum dalam AD / ART partai. Jika ada permasalahan maka prosedur penyelesaian persoalan tersebut yang pertama dilakukan adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan".

Penyelesaian konflik internal merupakan indikator penting dalam pelebagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), yang menekankan stabilitas struktur organisasi, kepatuhan terhadap aturan formal, serta mekanisme penyelesaian konflik yang terlembaga. Di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur, konflik internal relatif minim dan diselesaikan secara berjenjang melalui pendekatan kekeluargaan sebagai tahap awal, namun untuk konflik serius tetap mengacu pada prosedur formal Mahkamah Partai sesuai AD/ART, khususnya Pasal 40 Anggaran Dasar dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga. Penerapan mekanisme ini mencerminkan kapasitas organisasi (*organizational capacity*) yang kuat serta menunjukkan derajat kesisteman (*systemness*), internalisasi nilai (*value infusion*), dan kemandirian pengambilan keputusan (*decisional autonomy*), sehingga konflik tidak diselesaikan secara ad hoc atau bergantung pada figur tertentu. Temuan ini sejalan dengan teori Randall dan Svåsand (2002, p. 6) serta penelitian Haqiqi (2016), Pratama et al. (2022), dan Bendi Juantara (2015) yang menegaskan bahwa konsistensi aturan formal dan mekanisme organisasi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan partai politik.

Standar Rekrutmen Anggota, Pengurus Dan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Ad/Art Partai

Menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), derajat kesisteman (*degree of systemness*) dalam pelebagaan partai politik tercermin dari adanya aturan dan prosedur rekrutmen yang jelas, baku, dan dijalankan secara konsisten. Praktik rekrutmen di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan kombinasi pola inklusif dan eksklusif, di mana partai terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat namun tetap menekankan kaderisasi formal bagi calon anggota legislatif yang telah melalui jenjang perkaderan sesuai AD/ART. Mekanisme seleksi ini mempertimbangkan loyalitas, pemahaman ideologi, pengalaman organisasi, serta aspek popularitas, modal sosial dan ekonomi, serta kapasitas kepemimpinan, yang diatur secara formal dalam Pasal 11 AD PDI Perjuangan, Pasal 7 ART PDI Perjuangan, dan Peraturan Partai Nomor 25-A Tahun 2018. Dengan demikian, rekrutmen yang terstruktur dan tidak bergantung pada kehendak personal elite lokal tersebut mencerminkan derajat kesisteman yang kuat serta berfungsi sebagai instrumen pelebagaan yang memperkuat stabilitas dan keberlanjutan organisasi partai di tingkat lokal.

Hal tersebut diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Wilbrodus Darwin selaku wakil sekretaris bidang perogram, beliau mengatakan bahwa :

"Ada dua model ataupun pola rekrutmen PDI-P Kabupaten Manggarai Timur yaitut inklusif dan eksklusif. Model inklusif pola rekrutmen DPC PDI-P kabupaten Manggarai Timur dilakukan dengan cara merekrut kader yang memiliki popularitas, modal sosial dan ekonomi dalam masyarakat serta memiliki kemampuan dalam memimpin dan memiliki

kesamaan visi dan misi dengan PDI-P secara keseluruhan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 11 AD PDIP dan Pasal 7 ART PDIP serta diatur dalam Peraturan Partai dalam hal ini Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 25-A Tahun 2018 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

Jika dikaitkan dengan teori Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), praktik rekrutmen di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan derajat kesisteman yang baik karena dijalankan secara terstruktur, berbasis aturan formal, dan tidak bersifat personalistik. Kombinasi pola rekrutmen inklusif dan eksklusif memungkinkan partai tetap terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat, sekaligus memprioritaskan kader internal yang telah melalui jenjang perkaderan sesuai AD/ART dan Peraturan Partai Nomor 25-A Tahun 2018. Mekanisme ini memastikan proses kaderisasi dan pencalonan legislatif berjalan terencana, berkelanjutan, serta berorientasi pada loyalitas, pemahaman ideologi, dan kapasitas kepemimpinan, sehingga berdampak positif terhadap kualitas kader, kohesi internal, dan kinerja elektoral PDI Perjuangan di Manggarai Timur. Temuan ini sejalan dengan Haqiqi (2016), Pratama et al. (2022), dan Bendi Juantara (2015) yang menegaskan bahwa rekrutmen yang jelas dan konsisten memperkuat stabilitas serta keberlanjutan partai politik di tingkat lokal.

Basis Dukungan Partai/Pendukung Loyal dari Basis Sosial Tertentu (Agama, Etnis Dan Kelas)

Keberadaan basis dukungan sosial PDI Perjuangan di Kabupaten Manggarai Timur mencerminkan tingkat pelebagaan partai yang cukup kuat karena menunjukkan keterikatan sosial (rootedness) yang dibangun secara inklusif lintas agama, etnis, dan kelas sosial. Dalam perspektif Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), basis dukungan yang relatif loyal ini merepresentasikan proses *value infusion* dan *systemness*, yang terlihat dari hubungan historis, emosional, dan ideologis antara partai dan masyarakat melalui interaksi langsung kader dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Meskipun demikian, dukungan pemilih cenderung bersifat dinamis dan tidak sepenuhnya ideologis, karena turut dipengaruhi oleh figur, popularitas, dan kinerja individu calon legislatif. Dukungan kuat dari kelompok petani, buruh, dan masyarakat pedesaan menegaskan identitas PDI Perjuangan sebagai partai *wong cilik*, sekaligus menunjukkan bahwa keberlanjutan basis dukungan sangat bergantung pada kemampuan kader membangun relasi sosial yang konsisten dan berkelanjutan, sebagaimana diperkuat melalui wawancara dengan Bapak Salestinus Medi, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi PDI Perjuangan.

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Salestinus Medi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi PDI Perjuangan:

“Sejauh ini sudah ada basis dukungan PDI-P Kabupaten Manggarai Timur yakni dari seluruh elemen masyarakat lintas etnis dan budaya yang memiliki kesamaan ideologis. dengan PDI-P, Sehingga di semua dapil jumlah suara partai PDI-P mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari komunikasi politik para kader PDIP itu sendiri. Selain itu,

belakangan ini alasan pemilih dan arah pemilih sedikit bergeser dari sebelumnya ada ideologi partai namun skarang lebih pada figur atu tokoh yang saat ini populer secara publik”.

Basis dukungan PDI Perjuangan di Kabupaten Manggarai Timur mencerminkan tingkat pelebagaan partai yang relatif kuat sebagaimana dijelaskan dalam teori Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), terutama pada dimensi *value infusion*, *roots in society*, dan *systemness*. Dukungan yang bersifat lintas agama, suku, ras, dan kelas sosial menunjukkan internalisasi nilai nasionalisme, pluralisme, dan keberpihakan pada rakyat kecil, yang diperkuat melalui kehadiran nyata kader dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Akar sosial partai tampak kuat pada kelompok petani, buruh, masyarakat pedesaan, dan kelas menengah bawah, serta diperluas melalui jaringan organisasi sayap dan underbow seperti PETANI, GANTI, TMP, dan BAMUSI, serta keterlibatan tokoh adat dan pemimpin agama sebagai opinion leader. Meskipun terdapat kecenderungan pergeseran loyalitas pemilih ke arah figur dan kinerja individu kader, hubungan sosial-politik yang dibangun secara berkelanjutan dan terinstitusionalisasi ini menunjukkan derajat kesisteman yang cukup baik, berkontribusi pada legitimasi sosial dan kemenangan elektoral PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, serta sejalan dengan temuan Haqiqi (2016), Pratama et al. (2022), dan Bendi Juantara (2015) mengenai pentingnya stabilitas basis dukungan dalam pelebagaan partai politik.

Pengaruh Klientalisme dalam Pengambilan Keputusan

Pengaruh klientelisme dalam dinamika politik PDI Perjuangan di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan adanya hubungan timbal balik personal antara kader atau pemimpin partai dengan masyarakat yang berbasis pertukaran bantuan dan manfaat politik, yang dalam perspektif Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6) merepresentasikan *value infusion* yang bersifat pragmatis namun berpotensi melemahkan *systemness* apabila tidak dikelola secara institusional. Dalam konteks politik lokal yang bercorak patrimonial dan patron–klien, praktik ini menjadi realitas yang sulit dihindari, namun tidak sepenuhnya menggerus pelebagaan partai karena tetap diimbangi dengan internalisasi nilai ideologis PDI-P seperti nasionalisme, pluralisme, dan keberpihakan pada wong cilik melalui keterlibatan kader dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Meskipun terdapat pergeseran orientasi pemilih dari ideologi ke figur yang menandakan loyalitas masih bersifat personalistik, figur-figur tersebut tetap beroperasi dalam kerangka organisasi partai yang terstruktur. Konsistensi kerja politik melalui struktur organisasi, peran kader, dan koordinasi pimpinan partai menunjukkan derajat *systemness* yang relatif kuat, sehingga penguatan basis dukungan PDI-P di Manggarai Timur berlangsung secara terkoordinasi, terinstitusionalisasi, dan adaptif terhadap dinamika politik lokal.

Hal ini di perkuat dengan hasil Wawancara bersama Bapak Vinsensius Haliman selaku ketua DPC PDI-P Manggarai Timur, beliau mengatakan bahwa:

“Pada masa pemilihan,kebanyakan calon membentuk organisasi non-partai untuk menjaring suara yang dikenal dengan sebutan “tim sukses” yang kadang memanfaatkan kader-kader partai namun lebih sering bergantung pada tokoh atau pemuka masyarakat atau warga yang tidak terafiliasi dengan partai. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi

proses demokratisasi di Indonesia saat ini. Sebab demokratisasi dibayangkan bukan hanya sebagai proses stalisasi institusi mekanisme dan prosedur demokratis formal melainkan juga diharapkan akan menjadi ruang penting bagi upaya mendorong pola-pola hubungan yang lebih demokratis dalam urusan publik”.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori pelebagaan partai politik Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), basis dukungan PDI Perjuangan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dipahami sebagai hasil dari proses pelebagaan yang relatif matang, meskipun masih dihadapkan pada tantangan orientasi pemilih yang cenderung personalistik. Praktik klientelisme yang muncul melalui hubungan patron–klien antara kader, elite partai, tim sukses, dan masyarakat – melalui bantuan sosial, dukungan kegiatan adat dan keagamaan, bantuan pendidikan, serta akses program pemerintah – menjadi strategi pragmatis yang berkontribusi pada kemenangan elektoral PDI-P pada Pemilu 2024. Dalam perspektif teori, praktik ini merepresentasikan bentuk *value infusion* yang mampu memperkuat keterhubungan partai dengan masyarakat dan loyalitas jangka pendek, namun berpotensi melemahkan *systemness* apabila tidak dikendalikan secara institusional. Meski demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tetap diimbangi oleh keberadaan struktur organisasi, mekanisme internal partai, serta basis sosial yang kuat pada kelompok petani, buruh, masyarakat pedesaan, dan kelas menengah bawah, sehingga pelebagaan PDI Perjuangan di tingkat lokal tetap terjaga. Dengan kata lain, klientelisme berfungsi sebagai bentuk adaptasi politik terhadap konteks sosial lokal, sementara keberlanjutan dan stabilitas partai bergantung pada keseimbangan antara strategi pragmatis elektoral dan penguatan struktur, ideologi, serta sistem internal organisasi.

Kemandirian Keuangan Partai

Indikator kemandirian keuangan PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan kemampuan partai dalam membiayai kegiatan operasional, kaderisasi, pendidikan politik, dan kampanye secara relatif mandiri, meskipun masih terdapat ketergantungan pada bantuan DPP, kontribusi anggota DPRD, dan sumber eksternal lainnya. Dalam perspektif pelebagaan partai menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), kondisi ini mencerminkan derajat *systemness* yang cukup baik, karena partai telah memiliki sumber pendanaan internal yang menopang aktivitas organisasi, meski mekanisme keuangan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Berdasarkan Pasal 90 AD dan Pasal 87 ART PDI-P, sumber keuangan partai berasal dari iuran anggota, sumbangan kader dan legislator, hibah negara, serta sumber sah lainnya, yang di tingkat DPC Manggarai Timur dikelola secara fleksibel dan kontekstual, terutama menjelang pemilu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola pendanaan yang mengandalkan gotong royong politik dan kontribusi elit partai mampu menjaga stabilitas organisasi, namun belum didukung sistem iuran rutin yang mapan, sehingga kemandirian keuangan PDI-P Manggarai Timur dapat dikategorikan “cukup terlembaga” dan bersifat adaptif terhadap kebutuhan operasional partai.

Hal ini di Perkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Maria Alberta Asry Harman, selaku bendahara partai beliau mengatakan bahwa:

"Secara garis besar PDI-P Kabupaten Manggarai Timur sudah mandiri secara keuangan partai. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan DPC Kabupaten Manggarai Timur dalam membiayai seluruh aktifitas paratiai secara mandiri. di ketahui bersama bahwa sumber keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari dpp/namun dengan keterbatasan itu selama ini DPC Kabupaten Manggarai Timur tidak memberlakukan pungutan iuran wajib yang harus diserahkan oleh anggota partai secara rutin".

Indikator kemandirian keuangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan posisi partai yang *cukup terlembaga* dalam aspek otonomi organisasi, di mana kemampuan memobilisasi dan mengelola sumber daya finansial berpengaruh langsung terhadap efektivitas operasional, kaderisasi, pendidikan politik, dan strategi pemenangan Pemilu 2024. Meskipun ketergantungan pada dana DPP dan kontribusi personal kader legislatif masih terjadi akibat terbatasnya iuran anggota yang rutin, DPC tetap mengelola keuangan secara akuntabel dan sesuai AD/ART melalui mekanisme transparansi dan gotong royong politik. Alokasi anggaran yang konsisten untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat mencerminkan komitmen penguatan struktur dan kapasitas organisasi hingga tingkat akar rumput. Dalam perspektif pelebagaan partai menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), kondisi ini menunjukkan derajat otonomi yang relatif baik, meskipun masih memerlukan penguatan institusionalisasi keuangan agar kemandirian finansial dapat menopang pelebagaan partai secara lebih berkelanjutan.

Kemandirian Dalam Pengambilan Keputusan

Menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), kemandirian pengambilan keputusan merupakan indikator penting pelebagaan partai pada dimensi *systemness* dan *autonomy*, yang tercermin dari adanya struktur, prosedur, dan mekanisme kolektif yang dilebagaikan dalam menentukan keputusan strategis. Dalam konteks DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur, penggunaan Peraturan PDI-P Nomor 25-A Tahun 2018 sebagai pedoman rekrutmen dan seleksi calon legislatif menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak bersifat personalistik atau ad hoc, melainkan dilakukan secara berjenjang, terukur, dan berbasis aturan internal partai. Kondisi ini memberikan ruang bagi DPC untuk mengakomodasi potensi politik lokal yang dekat dengan konstituen, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap mekanisme organisasi, sehingga mencerminkan tingkat pelebagaan yang relatif tinggi dalam aspek kemandirian pengambilan keputusan serta memperkuat legitimasi dan konsistensi organisasi partai di tingkat lokal.

Hal ini di perkuat oleh hasin wawancara bersama Bapak Vinsensius Aliman selaku Ketua DPCP DI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur:

DPC PDI Perjuangan Kabupaten manggrai timur memiliki hak yang otonom dalam penentuan caleg yang akan bertarung dalam Pemilihan Legislatif. Caleg dari partai PDIP yang tersebar di 4 Dapil di Kabupaten Manggarai Timur adalah adalah Caleg yang telah memenuhi standar dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Peraturan

25-A Tahun 2018 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota PDI-P.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan kemandirian yang kuat dalam pengambilan keputusan politik, khususnya dalam rekrutmen dan seleksi calon legislatif yang berpedoman pada Peraturan Partai Nomor 25-A Tahun 2018. Melalui mekanisme yang akuntabel dan berjenjang, DPC memiliki kewenangan menilai rekam jejak, loyalitas kader, pengabdian kepada masyarakat, serta kemampuan komunikasi politik calon secara kontekstual sesuai karakteristik sosial budaya lokal, sehingga keputusan tidak semata bergantung pada struktur pusat tetapi responsif terhadap aspirasi pemilih. Jika dikaitkan dengan teori pelebagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), kondisi ini mencerminkan derajat otonomi yang relatif kuat, di mana keputusan strategis diambil dalam kerangka aturan internal yang terlembaga. Kemandirian tersebut berdampak langsung pada keberhasilan elektoral PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, karena calon yang diusung memiliki legitimasi sosial, kedekatan dengan masyarakat, serta rekam jejak pelayanan yang jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan pemilih, memperkuat loyalitas basis massa, dan mengonsolidasikan kekuatan partai di tingkat lokal.

Kiprah Partai Dalam Politik Lokal

Kiprah PDI Perjuangan di Kabupaten Manggarai Timur sejak 2009 hingga 2024 menunjukkan konsistensi dan kemampuan adaptasi partai dalam dinamika politik lokal, yang dalam perspektif pelebagaan partai menurut Randall dan Svåsand (2002, p. 6) tercermin pada kemapanan struktur organisasi, penguatan akar sosial, serta meningkatnya pengakuan publik (reification). Meskipun perolehan kursi legislatif bersifat fluktuatif – dari 2 kursi (2009), 3 kursi (2014), turun menjadi 2 kursi (2019), hingga melonjak menjadi 5 kursi pada Pemilu 2024 – PDI-P tetap menunjukkan penguatan peran politik melalui konsolidasi internal, kerja organisasi berjenjang dari ranting hingga cabang, serta penetrasi jaringan akar rumput yang berkelanjutan. Soliditas antarstruktur dan peran aktif kader legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil memperkuat citra partai di mata publik dan menjelaskan keberhasilan legislatif tersebut, meskipun kekalahan beruntun dalam Pilkada menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan partai belum sepenuhnya terkonversi ke ranah eksekutif. Kondisi ini menegaskan bahwa PDI-P Manggarai Timur telah memiliki tingkat pelebagaan yang relatif kuat pada dimensi systemness dan roots in society, yang menjadi fondasi keberlanjutan kekuatan elektoral partai di tingkat legislatif.

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Salestinus Medi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur dari Fraksi PDI Perjuangan:

“Kiprah PDI-P dalam peraturan Politik di Kabupaten Manggarai Timur dalam menduduki jabatan di Bidang Eksekutif (bupati dan wakil bupati) belum ada selama ini namun di Pemilihan Legislatif (DPRD) Sudah sangat baik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Manggarai Timur hal ini tidak terlepas adanya kebijakan dan program kerja yang lebih menitik beratkan kepada masyarakat kecil lewat Kader Partai yang ada di Lembaga Legislatif”.

Dalam praktiknya, DPC PDI-P Manggarai Timur semakin aktif membangun struktur organisasi yang terkoordinasi dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting melalui kegiatan rutin kepartaian, konsolidasi kader, serta penguatan peran badan dan badan sayap partai menjelang Pemilu 2024. Kiprah politik lokal partai juga tercermin dari kemampuannya menjaga hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat, tokoh lokal, dan komunitas adat, sehingga memperkuat posisi PDI-P sebagai aktor yang relevan di ruang publik Manggarai Timur. Kiprah tersebut tampak dari semakin kuatnya identifikasi kader dan simpatisan terhadap nilai-nilai partai, seperti nasionalisme, keberpihakan pada *wong cilik*, serta komitmen pada pembangunan desa, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kegiatan sosial dan politik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, PDI-P Manggarai Timur menunjukkan kemandirian dalam pengambilan keputusan strategis, mulai dari penentuan calon legislatif, alokasi sumber daya kampanye, hingga pola komunikasi politik tanpa terlalu bergantung pada aktor eksternal, yang tercermin dari lonjakan kursi DPRD dari 2 menjadi 5 pada.

Kiprah PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur dalam politik lokal menunjukkan penguatan yang signifikan namun bersifat dinamis, tercermin dari konsolidasi struktur organisasi yang terkoordinasi dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting, penguatan peran badan dan organisasi sayap, serta intensitas kegiatan kepartaian dan kaderisasi menjelang Pemilu 2024. Dalam perspektif pelembagaan partai menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), kondisi ini menunjukkan penguatan pada dimensi kesisteman (systemness) dan citra publik (reification), yang tampak dari meningkatnya identifikasi kader dan simpatisan terhadap nilai-nilai ideologis partai seperti nasionalisme, keberpihakan pada *wong cilik*, dan komitmen pada pembangunan desa, serta keberhasilan meraih 5 kursi DPRD pada Pemilu 2024 setelah sebelumnya mengalami fluktuasi (2 kursi pada 2009, 3 kursi pada 2014, dan 2 kursi pada 2019). Keberhasilan legislatif ini didukung oleh kemandirian DPC dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan kampanye, serta hubungan berkelanjutan dengan tokoh masyarakat dan komunitas adat, sehingga memperkuat pengakuan publik terhadap PDI-P sebagai aktor politik dominan di ranah legislatif. Namun demikian, kekalahan berulang dalam Pilkada 2008, 2013, 2018, dan 2024 menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kekuatan kelembagaan partai di legislatif dan keberhasilan di ranah eksekutif, yang dipengaruhi faktor patronase, popularitas figur, dan dinamika koalisi lokal, sehingga tantangan ke depan adalah mentransformasikan kekuatan legislatif dan citra publik tersebut ke dalam kemenangan eksekutif agar pelembagaan partai dapat terwujud secara lebih utuh dan berkelanjutan.

Kiprah Partai Di Masyarakat

Kiprah PDI-P di Kabupaten Manggarai Timur tercermin dari keterlibatan aktif partai dan kadernya dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, budaya, serta kehidupan komunitas lokal, yang memperkuat kedekatan emosional dan relasi partisipatif dengan masyarakat. Dalam kerangka pelembagaan partai menurut Vicky Randall dan Svåsand (2002, p. 6), kondisi ini menunjukkan penguatan pada dimensi penanaman nilai (*value infusion*), pengakuan publik (*reification*), dan akar sosial

(*rootedness in society*), melalui praktik nyata seperti bakti sosial, gotong royong desa, pendampingan warga kurang mampu, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta program KTP Sakti yang dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Keterlibatan dalam perayaan keagamaan, dukungan sarana ibadah, pelestarian adat, serta pendekatan intensif kader kepada tokoh adat dan komunitas lokal menjadikan PDI-P dipandang bukan sekadar aktor elektoral, melainkan bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sekaligus sarana internalisasi nilai ideologis dan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Hal ini di perkuat dengan hasil Wawancara bersama Bapak Antonius Dehot beliau mengatakan bahwa :

"Sejak saya tertarik dengan PDIP dan saya bergabung, di dasari oleh karena partai ini unik. Saya katakan partai ini unik karena partai ini merupakan partai yang sangat Demokrasi karna partai ini di bentuk dari gabungan beberapa orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda- beda dan selalu menjaga kedekatan dengan para tokoh masyarakat dan suku yang ada di manggarai timur dan terbukti masyarakat mampu menerimahnya dan kami menang."

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Gensius Jerabu, beliau mengatakan bahwa:

"Untuk menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensinya melalui kiprah partai di masyarakat, DPC PDIP Kabupaten Manggarai Timur melakukan kegiatan-kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal bagi kader partai dan masyarakat. Misalnya membangun melakukan pendekatan mendalam terhadap kelompok suku komunitas adat dan tokoh lokal di Kabupaten Manggarai Timur. Memberi sumbangan di lembaga-lembaga pendidikan swasta keagamaan,. Selain itu melakukan perbaikan jalan secara sukarela bersama warga".

Dalam praktiknya, kiprah DPC PDI-P Manggarai Timur dalam menjalin hubungan dengan kelompok suku, komunitas adat, dan tokoh lokal menjadi langkah strategis dalam merawat dukungan politik di tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis suku, agama, dan budaya memungkinkan PDI-P mengelola keberagaman sosial masyarakat Manggarai Timur secara inklusif melalui kegiatan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang identitas. Pola hubungan ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menciptakan loyalitas politik yang berbasis kedekatan sosial (*social proximity*), sehingga PDI-P dipersepsikan sebagai partai yang hadir dan membumi. Kepedulian konkret melalui bantuan sosial, kehadiran dalam momen duka dan suka cita warga, serta partisipasi aktif dalam agenda budaya memperkuat penerimaan PDI-P sebagai bagian integral dari kehidupan komunitas lokal.

Kiprah PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan penguatan yang berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui pendekatan inklusif berbasis suku, agama, dan budaya, yang dijalankan melalui hubungan intensif dengan komunitas adat, tokoh lokal, serta keterlibatan aktif kader dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya. Peran kader sebagai penghubung antara ideologi partai dan kebutuhan riil masyarakat—didukung pelatihan berjenjang serta segmentasi berbasis wilayah dan komunitas—memungkinkan nilai-nilai Marhaenisme diwujudkan dalam tindakan konkret seperti bakti sosial, pendampingan warga kurang mampu, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta

implementasi program KTP Sakti. Dalam kerangka pelebagaan partai menurut Randall dan Svåsand (2002, p. 6), praktik ini mencerminkan kuatnya penanaman nilai (*value infusion*), akar sosial (*rootedness in society*), dan pengakuan publik (*reification*), karena PDI-P dipersepsikan hadir, membumi, dan relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan publik dan kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2024.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kabupaten Manggarai Timur, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah anggota DPRD dari dua orang menjadi lima orang tidak terlepas dari penguatan empat aspek pelebagaan partai, yaitu derajat kesisteman, derajat identitas nilai, derajat otonomi, dan derajat pengetahuan. Secara keseluruhan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur telah cukup memenuhi indikator sebagai partai politik yang terlebaga berdasarkan kerangka konseptual pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Randall dan Svåsand (2002). Derajat kesisteman tercermin dari pelaksanaan sosialisasi politik yang terstruktur dan berkelanjutan, baik secara internal melalui pendidikan kader berbasis AD/ART maupun secara eksternal melalui pendekatan tatap muka, metode *door to door*, serta pemanfaatan media sosial yang terkoordinasi. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik internal dilaksanakan berdasarkan prosedur formal partai sehingga stabilitas dan soliditas organisasi tetap terjaga. Selanjutnya, derajat identitas nilai PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan internalisasi nilai ideologis partai seperti nasionalisme, pluralisme, dan keberpihakan kepada *wong cilik* yang cukup kuat di tengah masyarakat, meskipun masih bersifat dinamis akibat adanya kecenderungan dukungan berbasis figur dan relasi personal. Dari aspek derajat otonomi, DPC PDI Perjuangan memiliki kewenangan yang relatif mandiri dalam pengambilan keputusan politik dan rekrutmen calon legislatif berdasarkan Peraturan PDI Perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018, meskipun kemandirian finansial partai masih memerlukan penguatan institusional. Sementara itu, derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) PDI Perjuangan tergolong kuat, ditandai oleh pengakuan masyarakat terhadap eksistensi dan kiprah partai dalam politik lokal serta keterlibatannya dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya. Jika dikaitkan dengan teori pelebagaan partai politik Randall dan Svåsand (2002), kondisi ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur telah mencapai tingkat pelebagaan yang relatif baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bendi Juantara. (2015). *Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010-2015*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Galang Gerald. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDI-P, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 1(2).
<https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268>
- Haqiqi, P. (2016). Pelebagaan Partai NasDem (Studi Kasus Pelebagaan DPD Partai NasDem Kota Surabaya dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal Politik Muda*, 3(3), 1-23.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024*. https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/manggaraitimur/data_kepkpud/2024kpt558.pdf
- Namawi, H. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002a). Party institutionalization in new democracies. *Party Politics*, 8(1).
- Ridha, M. (2017). Dilema Pelebagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan. *CosmoGov*, 2(1).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Usmana, A. (2020). *Degradasi Suara Partai Bulan Bintang Pada Pemilu Legislatif Di Kota Medan Tahun 2019*. Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Winarti, N., & Nazaki. (2019). Problematika Kelebagaan Partai Politik : Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi. *Kemudi:Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).